

## Analysis Determinants of Local Government Financial Performance: Size of Local Government, Capital Expenditure, and Local Own-Source Revenue

Yuli Tri Cahyono<sup>1</sup> , Rihadatul Aisy<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Department of Accounting, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

<sup>2</sup> Department of Accounting, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

 [lytc115@ums.ac.id](mailto:lytc115@ums.ac.id)

### **Abstract**

*Local government financial performance is a performance process that is used a measure of success and becomes an evaluation for whether local government performance is going well or not for a period of time. This research aimed to examine the determinants of local government size, capital expenditure, and local own-source revenue on local government financial performance. The data used is LHP LKPD district/cities in Central Java in 2017-2019 obtained through the official website of <https://jateng-ppid.bpk.go.id/>. The sampling method used purposive sampling. The sample used was 35 district or cities over a period of 3 years, so data obtained were 105 observational data. The analytical technique used is multiple linear regression analysis using IBM SPSS Statistics 25. The results shows that size of local government and capital expenditure does not effect while local own-source revenue effect on local government effect on local government financial performance.*

**Keywords:** *financial performance; size of local government; capital expenditure; local own-source revenue.*

## Analisis Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal, Dan Pendapatan Asli Daerah

### **Abstrak**

Kinerja keuangan pemerintah daerah (Pemda) merupakan suatu proses kinerja yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dan menjadi bahan evaluasi apakah kinerja Pemda berjalan dengan baik atau tidak selama satu periode berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk menguji determinan ukuran Pemda, belanja modal, dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan Pemda. Data yang digunakan adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2017-2019 yang didapatkan melalui situs resmi <https://jateng-ppid.bpk.go.id/>. Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel yang digunakan sebanyak 35 Kabupaten/Kota selama kurun waktu tiga tahun, sehingga data yang diperoleh sebanyak 105 data pengamatan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda menggunakan program *IBM SPSS Statistic 25*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran Pemda dan belanja modal bukan merupakan determinan terhadap kinerja keuangan Pemda, sedangkan pendapatan asli daerah merupakan determinan terhadap kinerja keuangan Pemda.

**Kata kunci:** *kinerja keuangan pemerintah daerah; ukuran pemerintah daerah; belanja modal; pendapatan asli daerah.*

## 1. Pendahuluan

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah[1] dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan[2], maka Pemda memperoleh kewenangan otonomi yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sumarjo (2010)[3] dalam penelitiannya menyebutkan bahwa peranan otonomi daerah sangat penting demi terciptanya pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Selain itu, tujuan adanya otonomi daerah diharapkan mampu menjembatani Pemda untuk mandiri dalam melaksanakan pembangunan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah sering kali mengalami permasalahan. Hal ini terjadi karena peraturan atau kebijakan yang berlaku tidak diimplementasikan dengan baik, sehingga berdampak pada hasil kinerja yang menurun. Keberhasilan Pemda dalam menjalankan kegiatannya selama satu periode dapat dilihat dari aspek kinerja keuangan daerahnya. Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas agar mencapai visi dan misi yang diinginkan sesuai dengan aturan yang baik dan benar. Ardila dan Putri (2015)[4] dalam penelitiannya menyebutkan bahwa penilaian kinerja suatu organisasi sektor publik tidak hanya dinilai dari faktor *outputnya* saja, tetapi juga perlu untuk meninjau faktor *input* dan *outcome* secara bersamaan. Menurutnya, konsep *value for money* merupakan konsep yang selaras untuk mengukur tingkat ekonomi, efektivitas, dan efisiensi kinerja program suatu entitas. Implementasi sistem otonomi daerah yang belum maksimal menyebabkan pemerintah sebagai lembaga sektor publik sering kali dituntut oleh masyarakat untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga kinerja keuangan menjadi hal yang sangat penting bagi Pemda dan pihak eksternal lainnya.

Kinerja keuangan Pemda dapat dilihat dari bagaimana Pemda mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran berupa laporan keuangan yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan Pemda dapat dikatakan sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang memuat informasi untuk penilaian kinerja organisasi. Dengan adanya UU No. 33 Tahun 2004[2] bukan berarti Pemda dapat semena-mena dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Kinerja Pemda di beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari realita di masyarakat mengenai pelayanan publik, mulai dari infrastruktur jalan dan bangunan yang rusak, sumber daya dan manajemen yang kurang berkualitas, ketimpangan antara desa dan kota, hingga pembangunan manusia yang belum merata. Inilah waktu yang tepat bagi masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan untuk selalu memantau, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja keuangan Pemda.

Banyak penelitian sejenis yang sudah dilakukan terdahulu, yaitu dengan menggunakan variabel-variabel seperti *intergovernmental revenue*, kemakmuran, *size*, pendapatan asli daerah (PAD), belanja daerah, dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU), dana perimbangan, dan lain sebagainya. Selain itu, pengukuran kinerja keuangan Pemda pada penelitian terdahulu banyak menggunakan rasio kemandirian, rasio pertumbuhan, dan rasio *DSCR (Debt Service Coverage Ratio)*. Dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian terdahulu. Pertama, pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan tiga variabel independen yaitu ukuran Pemda, belanja modal, dan PAD. Kedua, peneliti menggunakan total aset untuk menghitung ukuran Pemda. Ketiga, sampel dan waktu penelitian yaitu

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2017-2019. Keempat, peneliti menggunakan rasio ekonomi untuk mengukur kinerja keuangan Pemda. Beberapa penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Rochmah (2015)[5] menyebutkan bahwa kinerja keuangan Pemda dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya penerimaan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, sumber daya manusia, dan kondisi makro ekonomi suatu daerah. Penelitian mengenai kinerja keuangan Pemda sebelumnya telah banyak dilakukan, diantaranya oleh Sari (2016)[6] menunjukkan bahwa ukuran Pemda dan PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010)[3] Kusumawardani (2012)[7], Retnowati (2016)[8], Masdiantini dan Erawati (2016)[9], Kiswanto dan Fatmawati (2019)[10]. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Novyandra dan Arifin (2016)[11], Saraswati dan Rioni (2019)[12] menemukan hasil bahwa ukuran Pemda tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda. Selain ukuran Pemda, PAD juga dapat dikatakan determinan terhadap kinerja keuangan Pemda. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016)[6] yang menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda, hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Jauhar (2016)[13], Antari dan Sedana (2018)[14], Anggraeni dan Artini (2019)[15], dan penelitian Sari dan Halmawati (2021)[16]. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Andirfa,dkk (2016)[17], Wahyuningsih (2016)[18] dan Novyandra dan Arifin (2016)[11] menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda. Selain PAD, belanja modal juga mempengaruhi kinerja keuangan Pemda. Penelitian yang dilakukan oleh Astiti dan Mimba (2016)[19], Mulyani dan Wibowo (2015)[20], Asnidar dan Hardi (2019)[21], dan penelitian Sari dan Mustanda (2020)[22] yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Rochmah (2015)[5], Jauhar (2016)[13], Anggraeni (2016)[23], Purwasih (2017)[24], dan Hastuti (2018)[25] menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, dapat dirumuskan tiga permasalahan, yaitu menjawab pertanyaan tentang: (1) Apakah ukuran Pemda berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda, (2) Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda, dan (3) Apakah PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran Pemda terhadap kinerja keuangan Pemda, (2) mengetahui dan menganalisis pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan Pemda, dan (3) mengetahui dan menganalisis pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan Pemda.

## 2. Literatur Review

### a. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Menurut PP No. 71 Tahun 2016 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan[26], laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan berisi informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan mempresentasikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan serta bertujuan untuk mengungkapkan akuntabilitas suatu entitas atas sumber daya yang telah dikelolanya. Mengacu pada PP No. 71 Tahun 2010[26], laporan keuangan setidaknya terdiri dari

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Pramono (2014)[27] dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kewajiban Pemda sebagai entitas yang diberi kewenangan menjalankan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah berupa laporan keuangan yang disusun berdasarkan PSAP No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan[28]. Tujuannya adalah untuk melaporkan proses dan hasil yang dicapai secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode, serta untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi, dan evaluasi kinerja.

**b. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Kinerja merupakan representasi mengenai ketercapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi perencanaan suatu (Mahsun, 2006:25)[29]. Definisi keuangan daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah[1] adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Salah satu pengukuran kinerja yang dapat menggambarkan kinerja Pemda adalah pengukuran kinerja keuangan. Nasution (2018)[30] dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pengukuran kinerja keuangan bertujuan meningkatkan akuntabilitas Pemda, transparansi publik, dan dapat digunakan untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengukuran kinerja dapat diukur dengan konsep *value for money*, yaitu ekonomis, efektivitas, dan efisiensi. Menurut penelitian Sari (2016)[6] kinerja keuangan menjadi suatu hal yang penting bagi Pemda dan pihak eksternal. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan daerah dapat menciptakan kinerja keuangan yang baik. Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi daerah yang berjalan dengan baik akan mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat. Salah satu cara untuk mengukur kinerja keuangan Pemda yaitu menggunakan rasio ekonomi. Rasio ini mengukur tingkat kehematan atas semua pengeluaran yang dilakukan oleh lembaga sektor publik (Mahsun, 2009:186)[31].

**c. Ukuran Pemerintah Daerah**

Ukuran Pemda merupakan salah satu variabel yang merepresentasikan besar/kecilnya suatu pemerintahan dan biasanya diukur dengan total aset, jumlah pegawai, total pendapatan, dan tingkat produktivitas. Suatu daerah yang memiliki ukuran daerah atau total aset yang besar akan mudah dalam menjalankan kegiatan operasional, sehingga Pemda akan maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut penelitian Kusumawardani (2012)[7] besarnya ukuran daerah akan meringankan Pemda dalam mendapatkan PAD untuk memajukan daerah sebagai bukti peningkatan kinerjanya. Penelitian ini menggunakan total aset Pemda sebagai proksi untuk merepresentasikan variabel ukuran Pemda.

**d. Belanja Modal**

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membeli dan menambah kekayaan pemerintah serta bertujuan untuk mendukung kegiatan daerahnya selama periode pemerintahan berlangsung. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010[26], belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya dan dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Penelitian Penatari dan Cahyono (2015)[32] menyebutkan bahwa belanja modal digunakan untuk membeli dan mengadakan aset tetap berwujud yang memiliki nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk mendukung kegiatan pemerintahan, misalnya tanah, mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, serta aset

tetap lainnya. Penelitian Astiti dan Mimba (2016)[19] menyatakan bahwa belanja modal yang dialokasikan secara tepat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja keuangan Pemda. Pengalokasian belanja modal dalam jumlah yang banyak dapat membantu masyarakat dalam pembangunan dan mampu mendapatkan sumber-sumber keuangan yang berguna untuk meningkatkan pendapatan daerah.

#### e. Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah[2], PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kekuasaan kepada Pemda dalam melaksanakan otonomi daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki sebagai wujud pelaksanaan desentralisasi. Penatari dan Cahyono (2015)[32] dalam penelitiannya menyebutkan bahwa PAD sebagai sumber penerimaan daerah perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban yang diperlukan dan bertujuan untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan demikian kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab dapat dilaksanakan. Menurut Halim (2012:96-98)[33], kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

### 3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015:13)[34] penelitian kuantitatif adalah penelitian berbasis pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, serta analisis data bersifat kuantitatif dan statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemda Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2017-2019. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2017-2019 yang didapatkan melalui situs resmi <https://jateng-ppid.bpk.go.id/>. Sebelum pengujian analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Analisis data untuk pembuktian hipotesis menggunakan regresi linear berganda (dengan variabel dependen kinerja keuangan Pemda serta ukuran Pemda, belanja modal, dan PAD sebagai variabel dependen) dengan bantuan program *IBM SPSS Statistic 25*.

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Hasil Analisis Data

Statistik deskriptif yang disajikan pada **Tabel 1** menginterpretasikan tentang variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan **Tabel 1** jumlah observasi (sampel penelitian) adalah sebanyak 105. Sesuai dengan kriteria pengujian normalitas menggunakan uji *CLT* (*Central Limit Theorem*) yaitu jumlah observasi (N) lebih besar dari 30, maka dapat dikatakan bahwa data sebanyak 105 dalam penelitian ini terdistribusi normal.

**Tabel 1.** Statistik Deskripif

<i>Variable</i>	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
UP	105	1.67E+12	3.10E+13	4.6398E+12	4,53598E+12
BM	105	0,117	0,799	0,21594	0,71982
PAD	105	9.25E+10	2.07E+12	3,9705E+11	2,79930E+11
KK	105	0,000	228,790	94,57677	25,336404

alisis deskriptif pada [Tabel 1](#) diperoleh nilai rata-rata (*mean*) variabel ukuran Pemda sebesar 4.639.762.957.144 dengan standar deviasi 4.535.980.498.070, sedangkan nilai *minimum* sebesar 1.672.569.021.424 dan *maximum* 3.0970.860.367.210. *Mean* variabel belanja modal sebesar 0,21594 dengan standar deviasi 0,071982, sedangkan nilai *minimum* sebesar 0,117 dan *maximum* 0,799. *Mean* variabel PAD sebesar 397.045.779.953 dengan standar deviasi 279.919.924.498, sedangkan nilai *minimum* sebesar 9.246.674.8340 dan *maximum* 2.066.333.418.588. *Mean* variabel kinerja keuangan sebesar 94,57677 dengan standar deviasi 25,336404, sedangkan nilai *minimum* sebesar 0,000 dan nilai *maximum* 228,790.

Untuk uji asumsi klasik, pada pengujian multikolinearitas dengan menggunakan *tolerance value* atau *Varian Inflation Factor (VIF)* menunjukkan *tolerance value* dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,1 dan nilai *VIF* lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel tidak terdapat masalah multikolinearitas. Hasil pengujian autokorelasi (*run test*) menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,280 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak terdapat autokorelasi. Uji heteroskedastisitas menggunakan uji *Glesjer* menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga semua variabel tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil pengujian *Adjusted R Square* pada penelitian ini menunjukkan nilai sebesar 0,115, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel independen mampu merepresentasikan kinerja keuangan Pemda sebesar 0,115 atau 11,5%, sedangkan sisanya sebesar 88,5% diprediksi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Hasil uji kelayakan (Uji F) menunjukkan tingkat signifikansi F sebesar 0,001 yang lebih kecil dari signifikansi  $\alpha$  (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Hal ini juga menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan adalah layak (*fit*).

Untuk pengujian pengaruh yang diolah menggunakan analisis regresi linear berganda, hasilnya adalah sebagaimana disajikan pada [Tabel 2](#).

**Tabel 2.** Persamaan Regresi Linear Berganda

<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	<i>(Constant)</i>	87,482	7,780		11,244	0,000
	UP	-9,998E-13	0,000	-0,179	-1,165	0,247
	BM	-29,505	32,941	-0,084	-0,896	0,373
	PAD	4,560E-11	0,000	0,504	3,286	0,001

Berdasarkan **Tabel 2** tersebut dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$KK = 87,482 - 9,998E-13 UP - 29,505 BM + 4,560E-11 PAD + e$$

Keterangan:

KK	=	Kinerja Keuangan Pemda
UP	=	Ukuran Pemda
BM	=	Belanja Modal
PAD	=	Pendapatan Asli Daerah
<i>e</i>	=	<i>Error</i>

Sesuai dengan **Tabel 2** tersebut, yang mana nilai signifikansi dari variabel ukuran Pemda dan belanja modal lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa secara statistik keduanya tidak signifikan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan. Sebaliknya nilai signifikansi variabel PAD yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel ini memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemda.

## 2. Pembahasan

- a. **Ukuran Pemda dan Kinerja Keuangan Pemda.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran Pemda tidak berpengaruh (secara statistik tidak signifikan) terhadap kinerja keuangan Pemda. Ukuran Pemda yang diukur menggunakan total aset biasanya memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda, namun pada penelitian ini ukuran Pemda tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda. Penyebabnya adalah peran total aset dalam meningkatkan kinerja keuangan Pemda belum berfungsi secara optimal. Bukan hanya jumlah aset yang besar, namun manajemen dan sumber daya Pemda Kabupaten/Kota di Jawa Tengah juga belum dapat memanfaatkan dan mengelola aset yang dimiliki agar kinerja keuangan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Novyandra dan Arifin (2016)[11], Saraswati dan Rioni (2019)[12], dan penelitian Arifin, Ethika, dan Fauziati (2020)[35] yang menyatakan bahwa ukuran Pemda tidak mempengaruhi kinerja keuangan Pemda, namun penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Sari (2016)[6], Sumarjo (2010)[3], Kusumawardani (2012)[7], Retnowati (2016)[8], Masdiantini dan Erawati (2016)[9], dan penelitian Kiswanto dan Fatmawati (2019)[10] yang menyatakan bahwa ukuran Pemda berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda.
- b. **Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Pemda.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda. Pada umumnya jumlah belanja modal yang kurang dan seringkali berfluktuasi menyebabkan adanya kesenjangan antar wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, yaitu kesenjangan infrastruktur, ekonomi, dan sosial akibat perbedaan distribusi sumber daya di setiap daerah. Penyerapan belanja daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah belum maksimal karena kualitas sumber daya dan tingkat pemahaman para pengelola keuangan SKPD yang belum optimal. Realisasi belanja modal memerlukan efektivitas dan efisiensi yang baik sehingga anggaran belanja modal dapat memberikan kinerja Pemda yang optimal. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kegiatan belanja modal yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2017-2019 tidak berdampak pada kinerja keuangan Pemda karena tidak didistribusikan secara baik dan merata. Dengan demikian belanja modal bukan merupakan determinan terhadap kinerja keuangan Pemda. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Rochmah (2015)[5], Jauhar

(2016)[13], Anggraeni (2016)[23], Purwasih (2017)[24], dan Hastuti (2018)[25] yang menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda, namun berbeda dengan penelitian Astiti dan Mimba (2016)[19], Mulyani dan Wibowo (2015)[20], Asnidar dan Hardi (2019)[21], dan penelitian Sari dan Mustanda (2020)[22] yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda.

- c. **PAD dan Kinerja Keuangan Pemda.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda. PAD menggambarkan arti sebagai pendapatan yang bersumber dari pungutan yang dilakukan oleh suatu daerah atas dasar peraturan yang berlaku dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi, dan penerimaan lain yang sah. Peningkatan PAD berbanding lurus dengan peningkatan kinerja keuangan Pemda. Meningkatnya PAD menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemda dalam keadaan yang baik. Hal ini ditandai dengan ketergantungan fiskal daerah terhadap bantuan pemerintah pusat semakin berkurang. Dengan demikian PAD merupakan determinan terhadap kinerja keuangan Pemda. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Sari (2016)[6], Jauhar (2016)[13], Antari dan Sedana (2018)[14], Anggraeni dan Artini (2019)[15], dan penelitian Sari dan Halmawati (2021)[16] yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemda, namun tidak sejalan dengan hasil penelitian Andirfa, dkk (2016)[17], Wahyuningsih (2016)[18], dan penelitian Novyandra dan Arifin (2016)[11] yang menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda.

## 5. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka diperoleh simpulan bahwa:

1. Ukuran Pemda tidak berpengaruh (secara statistik tidak signifikan) terhadap kinerja keuangan, sehingga bukan merupakan determinan terhadap kinerja keuangan Pemda.
2. Belanja modal tidak berpengaruh (secara statistik tidak signifikan) terhadap kinerja keuangan, sehingga bukan determinan terhadap kinerja keuangan Pemda.
3. PAD berpengaruh (secara statistik signifikan) terhadap kinerja keuangan, sehingga merupakan determinan terhadap kinerja keuangan Pemda.

Penelitian ini masih terdapat keterbatasan-keterbatasan yang menjadi kurang dapat digeneralisasikan hasilnya untuk penelitian sejenis, seperti jumlah variabel yang hanya tiga dan sampel yang hanya terbatas pada Pemda Kabupaten/Kota di Jawa Tengah periode 2017-2019. Sebagai saran, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen serta memperluas atau memperbanyak sampel dan waktu penelitian agar hasilnya dapat digeneralisasikan.

## Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada Humas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kepala PPID BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, dan Drs. Yuli Tri Cahyono, M.M., Ak., CA., selaku dosen pembimbing, serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Demikian penelitian ini disusun, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan keberkahan atas semua kebaikan yang diberikan kepada penulis dan semoga penelitian ini kelak bermanfaat bagi para pembaca.



## Referensi

- [1] R. Indonesia, "Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah," 2004.
- [2] R. Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah," 2004.
- [3] H. Sumarjo, "Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ( Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Indonesia )," *digilib.uns.ac.id.*, 2010.
- [4] I. Ardila And A. A. Putri, "Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi," *Ris. Akunt. Dan Bisnis*, Vol. 15, No. 1, Pp. 52–64, 2015.
- [5] S. N. Rochmah, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2012)," *e-print.ums.ac.id.*, 2015.
- [6] I. P. Sari, "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pad, Leverage, Dana Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kab/Kota Pulau Sumatera)," *Jom Fekon*, Vol. 3, No. No 1, Pp. 679–692, 2016.
- [7] M. Kusumawardani, "Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia," *Account. Anal. J.*, Vol. 1, No. 1, 2012, [Online]. Available: <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj%0apengaruh>.
- [8] R. Retnowati, "Analisis Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah/Kota Se-Jawa Tengah 2011-2013)," *e-print.ums.ac.id.*, 2016.
- [9] P. R. Masdiantini And N. M. A. Erawati, "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan Dan Opini Audit BPK Pada Kinerja Keuangan," *E-Jurnal Akunt. Univ. Udayana.14.2*, Pp. 1150–1182, 2016.
- [10] Kiswanto And D. Fatmawati, "Determinan Kinerja Pemerintah Daerah : Ukuran Pemda, Leverage, Temuan Audit Dan Tindak Lanjutnya," *J. Kaji. Akunt.*, Vol. 3, No. 1, Pp. 44–54, 2019, [Online]. Available: <http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/jka>.
- [11] R. Novyandra And A. Arifin, "Pengaruh Belanja Modal, Intergovernmental Revenue, Leverage, Size Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Di Pulau Jawa Tahun 2014," *e-print.ums.ac.id.*, pp. 68–70, 2016.
- [12] D. Saraswati And Y. S. Rioni, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah," *J. Akunt. Bisnis Dan Publik*, Vol. 9, No. 2, Pp. 110–120, 2019.
- [13] F. Jauhar, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota Se Sumatera Barat," *Artik. Univ. Negeri Padang*, 2016.
- [14] N. P. G. S. Antari And I. B. P. Sedana, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah," *E-Jurnal Manaj. Unud*, Vol. 7, No. 2, Pp. 1080–1110, 2018, Doi: <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i02.p19>.
- [15] N. K. A. Anggraeni And L. G. S. Artini, "Pengaruh Pad, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali," *E-Jurnal Manaj. Unud*, Vol. 8, No. 3, Pp. 1315–1345, 2019, Doi: <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v8.i3.p6>.
- [16] B. I. Sari And Halmawati, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat," *J. Eksplor. Akunt.*, Vol. 3, No. 1, Pp. 1–11, 2021, [Online]. Available: <http://jea.pppj.unp.ac.id/index.php/jea>.
- [17] M. Andirfa, H. Basri, And S. A. Majid, "Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh," *J. Magister Akunt. Pascasarj. Univ. Syiah Kuala*, Vol. 5, No. No. 3, Pp. 30–38, 2016.
- [18] Y. E. Wahyuningsih, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana

- Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Naskah Publikasi,” *e-print.ums.ac.id*, 2016.
- [19] D. N. Y. Astiti And N. P. S. H. Mimba, “Pengaruh Belanja Rutin Dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah,” *E-Jurnal Akunt. Univ. Udayana.14.3*, Vol. 3, Pp. 1924–1950, 2016.
- [20] S. Mulyani And H. Wibowo, “Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmentalrevenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah,Tahun 2012-2015),” *J. Kompartemen*, Vol. Xv, No. 1, Pp. 57–66, 2015.
- [21] Asnidar And N. S. Hardi, “Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa,” *J. Samudra Ekon.*, Vol. 3, No. 1, Pp. 9–18, 2019.
- [22] N. M. D. P. Sari And I. K. Mustanda, “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah,” *E-Jurnal Manaj.*, Vol. 8, No. 8, Pp. 4759–4787, 2019, Doi: <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i08.p02>.
- [23] A. Anggraeni, “Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Intervening,” *Univ. Muhammadiyah Yogyakarta*, 2016.
- [24] Purwasih, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah,” *Univ. PGRI Yogyakarta*, 2017.
- [25] S. D. Hastuti, “Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pada BPKPAD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar,” *Univ. Muhammadiyah Makassar*, 2018.
- [26] R. Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,” 2010.
- [27] J. Pramono, “Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah,” *J. Ilm. Among Makarti*, Vol. 7, Pp. 83–112, 2014.
- [28] Komite Standar Akuntansi Pemerintah, “Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 01 Penyajian Laporan Keuangan,” No. 01, 2005.
- [29] M. Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Pertama. Yogyakarta: Bpfe, 2006.
- [30] D. A. D. Nasution, “Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah,” *J. Stud. Akunt. Keuang.*, Vol. 2, Pp. 149–162, 2018.
- [31] M. Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE, 2009.
- [32] R. I. Penatari And Y. T. Cahyono, “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Wilayah Jawa Tengah Tahun 2012-2014),” 2015.
- [33] A. Halim, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Keempat. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2012.
- [34] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- [35] M. Arifin, Ethika, And P. Fauziati, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2018),” *Artikel*, 2020, [Online]. Available: <https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php>.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)